



Transisi Jamkesda ke JKN hingga 2016

YOGYAKARTA – Proses transisi dari jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Yogyakarta ditargetkan beres pada 2016.

Selama dua tahun mendatang, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta berharap program Jamkesda sudah terintegrasi penuh ke JKN.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta Vita Yulia mengatakan, telah menyusun dua agenda untuk mengejar target tersebut. Selain sosialisasi, akan dilakukan pula verifikasi ulang kondisi masyarakat untuk mendapatkan data riil klasifikasi yang berhak menjadi penerima bantuan iuran (PBI) atau bukan. "Kami akan verifikasi bersama dengan Tim Penanganan Kemiskinan Perkotaan (TKPK) untuk menggali kebenaran data tercecer," katanya.

Proses verifikasi dan so-

sialisasi dibutuhkan karena saat ini Jamkesda di Kota Yogyakarta tidak membutuhkan syarat keanggotaan. Seluruh masyarakat yang memiliki KTP Kota Yogyakarta bisa mengakses program jaminan kesehatan dari pemkot.

Namun sesuai prosedur yang berlaku, untuk JKN, tidak semua masyarakat bisa menjadi PBI. "Yang mampu ya membayar iuran sendiri dan bisa memilih ada tiga kategori jaminan yang bisa diakses," kata Vita.

Disinggung kewajiban kepesertaan, Vita menyebutkan, kepesertaan di JKN tidak bisa dikatakan wajib. Alasannya, tidak ada sanksi bagi yang tidak mau menjadi peserta. Dengan me-

iliki jaminan kesehatan, masyarakat tidak perlu lagi waswas ketika tiba-tiba jatuh sakit dan harus berobat. "Sekarang daftar (JKN) bayar iuran, besok sakit sudah langsung bisa dimanfaatkan," katanya.

Sementara itu, memasuki hari keenam pelaksanaan JKN, antusiasme masyarakat Kota Yogyakarta memanfaatkan program pemerintah itu masih belum terlihat. Masyarakat masih tetap memilih memanfaatkan Jamkesda karena hanya tinggal menunjukkan kepemilikan KTP Kota Yogyakarta.

"Permintaan rekomendasi untuk JKN belum banyak. Justru banyak warga yang gunakan Jamkesda, cukup tunjukkan kartu identitas, maka pelayanan (kesehatan) gratis," kata Kepala Puskesmas Gedongtengen Tri Kusumo Bawono.

Mengenai mekanisme layanan JKN, Tri menginforma-

sikan, puskesmas sebagai pintu pertama layanan kesehatan tidak akan langsung mengeluarkan surat rujukan kepada masyarakat. Sesuai prosedur yang berlaku, penanganan kesehatan tetap akan diupayakan lebih dulu di puskesmas.

Jika puskesmas tidak mampu menangani, maka pasien langsung diberikan surat rujukan untuk bisa mengakses layanan lanjutan di rumah sakit. "Bagaimana pun, kami tetap selektif. Semua ini demi penanganan pasien yang lebih optimal," ucapnya.

Sementara itu, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jogja, lonjakan pasien karena program JKN juga belum dirasakan. Pengakses program tersebut saat ini adalah para pemilik Askes karena JKN dilaksanakan oleh PT Askes yang sekarang berubah menjadi BPJS Kesehatan.

● maha deva

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005